



GEMAH RIPA WAWA MUKTI

PEMERINTAH  
KOTA BANDUNG

L K I P

L A P O R A N  
K I N E R J A  
I N S T A N S I  
P E M E R I N T A H

T A H U N 2 0 1 9

D I N A S P E R D A G A N  
D A N P E R I N D U S T R I A N



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Wali Kota Bandung dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan, capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini digunakan untuk membuktikan sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kepala Dinas yang telah ditetapkan pada Tahun 2019.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan tersebut setiap sasaran menunjukan beberapa tantangan dan perbaikan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung kedepan, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik, sehubungan dengan hal tersebut pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai unsur Instansi terkait ataupun mitra-mitra kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Sebagai langkah nyata dari perbaikan berkelanjutan tersebut, pada Tahun 2019 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung akan mempersiapkan SDM dan infrastruktur untuk mendorong pelayanan publik prima yang dicanangkan oleh Walikota Bandung untuk mendukung *Zero Complain Governance* dengan memperhatikan kondisi perkembangan Perdagangan dan Industri di Kota Bandung.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang mencakup Akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2018-2023.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung disusun berdasarkan pada PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Penyusunan LKIP 2019 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, serta Akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, 03 Januari 2020

KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA BANDUNG



**Ir. Hj. ELLY WASLIAH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631229 198603 2 005

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian .....	I-2
C. Tugas dan Fungsi .....	I-3
D. Isu Strategis .....	I-5
E. Landasan Hukum .....	I-6
F. Sistematika .....	I-7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>II-8</b>
1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu .....	II-8
A. Rencana Strategis .....	II-8
1. Visi .....	II-9
2. Misi .....	II-10
3. Tujuan dan Sasaran .....	II-10
B. Indikator Kinerja Utama .....	II-12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	II-13
1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu .....	II-14
A. Rencana Strategis Hasil Reviu .....	II-14
B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu .....	II-15
C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu .....	II-18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III-19</b>
A. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	III-19
B. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	III-21
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ...	
D. Akuntabilitas Keuangan .....	III-23
	III-43
<b>BAB IV PENUTUP ... ..</b>	<b>IV-44</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.



Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



## **B. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Perdagangan dan Perindustrian. Pembentukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung yang merupakan penjabaran dari Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota, sesuai kewenangan telah diatur urusan yang harus dilaksanakan terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, terkait dengan Perdagangan dan Perindustrian termasuk kedalam Urusan Pilihan.



### **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban :

Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perdagangan Dan Perindustrian mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan lingkup urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan lingkup urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup bidang perdagangan dan bidang perindustrian; dan



5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas, dipimpin oleh Ir. Hj. Elly Waslih yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

A. Sekretaris, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
3. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi.

B. Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan, membawahkan :

1. Kepala Seksi Pelatihan dan Pembinaan Perdagangan;
2. Kepala Seksi Sarana dan Pembiayaan Perdagangan; dan
3. Kepala Seksi Pengembangan dan Promosi Perdagangan.

C. Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengembangan E-Commerce, membawahkan :

1. Kepala Seksi Distribusi Perdagangan;
2. Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
3. Kepala Seksi Pengembangan E-Commerce.



D. Kepala Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri, membawahkan :

1. Kepala Seksi Ekspor Impor;
2. Kepala Seksi Pengembangan Ekspor; dan
3. Kepala Seksi Hubungan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri.

E. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri, membawahkan :

1. Kepala Seksi Perencanaan Sentra Industri;
2. Kepala Seksi Pengembangan, Inovasi dan Teknologi; dan
3. Kepala Seksi Standarisasi Industri.

F. Kepala Bidang Sumber Daya dan Promosi Industri, membawahkan :

1. Kepala Seksi Sumber Daya dan Investasi Industri;
2. Kepala Seksi Sistem Produksi dan Pembiayaan; dan
3. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Industri.

G. Kepala UPT Balai Industri dan Promosi, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.



H. Kepala UPT Metrologi Legal, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **D. Isu Strategis**

1. Masih rendahnya daya saing produk Perdagangan dan Perindustrian;
2. Masih Rendahnya SDM Perdagangan dan Perindustrian;
3. Kurang optimalnya pengembangan Industri Kreatif Kota Bandung;
4. Rendahnya Kualitas produk ekspor dan kurangnya informasi mengenai prosedur ekspor;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen dan terjadinya gejolak harga serta masih beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal di Kota Bandung; dan
6. Belum optimalnya kualitas laporan keuangan dan AKIP.



## **E. Landasan Hukum**

LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;



8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

#### **F. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

**BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

**BAB IV PENUTUP**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu**

##### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 800/Kep.1000-DISDAGIN/III/2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas



Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas



Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kota Bandung tahun 2018-2023, yaitu **“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”**.

**Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,

**Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan



terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.

**Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

**Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan



antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

**Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga di implementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

## **2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Dalam mewujudkan Visi Kota Bandung tersebut, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengacu pada Misi 3 yaitu **“Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan”**



### **3. Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Dalam rangka untuk mencapai keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran berikut indikator kinerja dan target pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.1**
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat	Kualitas pelayanan masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	83	84	85	86
2	Terwujudnya perdagangan dan perindustrian yang berdaya saing	Perdagangan yang berdaya saing	Meningkatnya daya saing perdagangan	Meningkatnya pelaku usaha perdagangan yang berdaya saing	Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan	10 komoditi	n/a	n/a	n/a	n/a
					Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
					Cakupan pembinaan e-commerce	150 pelaku usaha	n/a	n/a	n/a	n/a
					Nilai daya saing perdagangan e-commerce	n/a	400 point	500 poin	600 poin	700 poin
					Meningkatnya kualitas pelaku perdagangan dalam negeri	255 pelaku usaha	n/a	n/a	n/a	n/a
					Nilai daya saing perdagangan	n/a	450 poin	550 poin	600 poin	700 poin
					Jumlah alat UTTP yang terstandarisasi	n/a	120.500 alat UTTP	121.000 alat UTTP	121.500 alat UTTP	122.000 alat UTTP
					Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	120.600 alat UTTP	n/a	n/a	n/a	n/a
		Nilai ekspor	Nilai Ekspor Kota Bandung	US\$ 466 jt	US\$ 467 jt	US\$ 468 jt	US\$ 469 jt	US\$ 470 jt		
		Perindustrian yang berdaya saing	Meningkatnya daya saing perindustrian	Meningkatnya IKM yang berdaya saing	Meningkatnya IKM yang memiliki standarisasi	350 IKM	n/a	n/a	n/a	n/a
					Jumlah Industri Kecil Menengah Tersertifikasi	n/a	362 IKM	372 IKM	382 IKM	392 IKM
					Meningkatnya IKM yang berdaya saing	280 IKM	n/a	n/a	n/a	n/a
					Jumlah industri kecil menengah yang meningkat daya saingnya	n/a	280 IKM	360 IKM	390 IKM	400 IKM



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
					Meningkatnya kemampuan IKM dalam proses produksi	250 pelaku usaha	n/a	n/a	n/a	n/a
					Jumlah industri kecil menengah yang meningkat kemampuannya dalam proses produksi	n/a	150 pelaku usaha	150 pelaku usaha	150 pelaku usaha	150 pelaku usaha
				Meningkatnya daya saing sentra industri	Meningkatnya daya saing sentra industri	1 Sentra	n/a	n/a	n/a	n/a
					Jumlah sentra industri yang meningkat daya saingnya	n/a	4 sentra	8 sentra	12 sentra	16 sentra

## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Nomor 800/Kep.223/DISDAGIN/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya daya saing perdagangan	Nilai ekspor Kota Bandung	Juta US\$	Berdasarkan Permendag Nomor 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang ketentuan dan tatacara penerbitan SKA	Jumlah penerbitan SKA Kota Bandung	Nilai ekspor dilihat dari realisasi SKA Kota Bandung. Satuan nilai yaitu US\$, berdasarkan nilai yang tercantum pada pemberitahuan ekspor barang yang dikeluarkan oleh Bea Cukai
		Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	Jenis UTTP	Untuk melindungi kepentingan umum dan konsumen	Sesuai UTTP yang diuji oleh pemilik	Masa uji UTTP cap tanda sah sudah habis
2	Meningkatnya daya saing perindustrian	Meningkatnya IKM yang memiliki standarisasi	IKM	Sertifikasi merupakan legalitas serta ukuran mutu suatu produk maupun SDM dan sertifikat kepemilikan merk (Kekayaan Intelektual) menjadi kepastian hukum bagi pemilik produk	Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi sertifikasi produk dan kompetensi SDM pelaku IKM	Melalui Fasilitasi Pendaftaran Serifikasi yang dilaksanakan oleh Disdagin

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun



prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya daya saing perdagangan	Nilai ekspor Kota Bandung	US\$ 466 jt
		Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	120.600 alat UTTP
2	Meningkatnya daya saing perindustrian	Meningkatnya IKM yang memiliki standarisasi	350 IKM



## **1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu**

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Pada Tahun 2019 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tidak melakukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023.



Dinas Perdagangan dan Perindustrian

---



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan



kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :



Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Kemudian, predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung  
Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator



kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran strategis dan sebanyak 3 indikator kinerja dengan rincian :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota



Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah 800/Kep.223/DISDAGIN/I/2019. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung**  
**Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai ekspor Kota Bandung	Juta US\$	466	466.159	100.03
2	Meningkatnya alat UTTP yang di tera/tera ulang	Alat UTTP	120.600	124.646	103.35
3	Meningkatnya IKM yang memiliki standarisasi	IKM	350	350	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Nilai ekspor Kota Bandung, dengan realisasi sebesar US\$ 466.159 juta dari target sebesar US\$ 466 juta atau dengan capaian kinerja 100.03 % dan indikator Meningkatnya alat UTTP yang di tera/tera ulang, dengan realisasi sebanyak



124.646 alat UTTP dari target sebanyak 120.600 alat UTTP atau dengan capaian kinerja 103.35 %. Sedangkan capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Meningkatnya IKM yang memiliki standarisasi dengan realisasi sebanyak 350 IKM dari target sebanyak 350 IKM.

### **C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2019 adalah Tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 12 indikator kinerja yang ditetapkan, maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung**  
**Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	82	82.55	100.67
2	Nilai Ekspor	Juta US\$	466	466.159	100.03
3	Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan	Komoditi	10	10	100.00
4	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	15	9.22	162.69
5	Cakupan pembinaan e-commerce	Pelaku usaha	150	150	100.00
6	Meningkatnya kualitas pelaku perdagangan dalam negeri	Pelaku usaha	255	255	100.00
7	Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	Alat UTTP	120.600	124.646	103.35
8	Informasi mengenai barang kena cukai ilegal	merk rokok	15	15	100.00
9	Meningkatnya IKM yang memiliki standarisasi	IKM	350	350	100.00
10	Meningkatnya IKM yang berdaya saing	IKM	280	280	100.00
11	Meningkatnya kemampuan IKM dalam proses produksi	Pelaku usaha	250	250	100.00
12	Meningkatnya daya saing sentra industri	Sentra	1	1	100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung**  
**Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33.33 %
2	Sesuai Target	66.67 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 3	12	4	33.33	8	66.67	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>33.33</b>	<b>8</b>	<b>66.67</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 12 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 3</b>	<b>12</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	4	33.33 %
2	Sesuai Target	8	66.67 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra;
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta;
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target serta realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 12 indikator



kinerja yang mengacu kepada Misi 3 yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**  
Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Peningkatan kualitas pelayanan publik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	81	81.05	100.06	82	82.55	100.67

Sasaran Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks kepuasan masyarakat (IKM)" adalah sebesar 82.55 atau dengan kategori **Sangat Baik** dari nilai target sebesar 82 yang direncanakan Tahun 2019, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.67 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.



Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks kepuasan masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 100.67 %. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0.61 poin dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai nilai sebesar 81.05. Indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat (IKM) didukung oleh Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran pada Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 64.278.000,00 yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah.

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun melalui metode survey dengan kuesioner terhadap warga masyarakat yang menerima pelayanan, baik pelayanan di Kantor UPT Metrologi Legal serta UPT Balai Industri dan Promosi maupun Unit Pelayanan IPSKA pada Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Adapun indikator dan unit variabel pertanyaan kuesioner dalam survey ini mengacu kepada standar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Kepmenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Terdapat 14 (empat belas) unsur yang dinilai dalam survey ini, yang meliputi :

U.1. Kemudahan prosedur pelayanan;

U.2. Keseuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan;



- U.3. Kejelasan dan kepastian petugas dalam melayani;
- U.4. Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan;
- U.5. Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan;
- U.6. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan;
- U.7. Kecepatan pelayanan;
- U.8. Keadilan dalam melakukan pelayanan;
- U.9. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan;
- U.10. Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan;
- U.11. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- U.12. Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan;
- U.13. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan;
- U.14. Keamanan di unit pelayanan.

Selanjutnya nilai per unsur dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang di lakukan melalui metode survey dengan kuesioner, di uraikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Nilai Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung**  
**Tahun 2019**

<b>No. Unsur</b>	<b>Unsur Pelayanan</b>	<b>Nilai Per Unsur</b>	<b>Rata-rata</b>
U.1	Kemudahan prosedur pelayanan	3,22	0,23
U.2	Keseuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	3,32	0,24
U.3	Kejelasan dan kepastian petugas dalam melayani	3,38	0,24
U.4	Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan	3,40	0,24
U.5	Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan	3,47	0,25
U.6	Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	3,46	0,25
U.7	Kecepatan pelayanan	3,01	0,21
U.8	Keadilan dalam melakukan pelayanan	3,14	0,22
U.9	Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan	3,49	0,25
U.10	Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan	3,27	0,23
U.11	Keseuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	3,44	0,24
U.12	Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan	3,47	0,25
U.13	Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan	3,35	0,24
U.14	Keamanan di unit pelayanan	3,08	0,22
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,30</b>
<b>Nilai IKM</b>			<b>82,55</b>
<b>Nilai Mutu Pelayanan</b>			<b>A</b>
<b>Kategori Kinerja Pelayanan</b>			<b>Sangat Baik</b>

Sumber : Diolah Subag Prodatin Disdagin Kota Bandung, 2019

**Sasaran 2**

Meningkatnya daya saing perdagangan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya daya saing perdagangan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Ekspor	Juta US\$	462	465	100.65	466	466.159	100.03
2	Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan	Komoditi	n/a	n/a	0.00	10	10	100.00
3	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	15	13.74	108.40	15	9.22	162.69
4	Cakupan pembinaan e-commerce	Pelaku usaha	n/a	n/a	0.00	150	150	100.00
5	Meningkatnya kualitas pelaku perdagangan dalam negeri	Pelaku usaha	300	300	100.00	255	255	100.00
6	Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	Alat UTTP	n/a	n/a	0.00	120.600	124.646	103.35
7	Informasi mengenai barang kena cukai ilegal	merk rokok	n/a	n/a	0.00	15	15	100.00

Sasaran Meningkatkan Daya Saing Perdagangan dapat dilihat dari sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu : (1) Nilai Ekspor; (2) Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan; (3) Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok; (4) Cakupan pembinaan e-commerce; (5) Meningkatkan kualitas pelaku perdagangan dalam negeri; (6) Meningkatkan Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang; dan (7) Informasi mengenai barang kena cukai ilegal.



## 1. Nilai Ekspor

Capaian target kinerja pada Tahun 2019 adalah sebesar US\$ 466.159 juta dari target sebesar US\$ 466 juta, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.03 %, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar 0.25 %. Pengukuran capaian kinerja Nilai Ekspor di peroleh dari Nilai Free On Board (FOB) melalui pengajuan Surat Keterangan Asal (SKA) Barang Kota Bandung dan berdasarkan nilai yang tercantum pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dikeluarkan oleh Bea Cukai.

Indikator kinerja Nilai Ekspor didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan alokasi anggaran pada Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 1.140.889.000,00 yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Kerjasama dengan Lembaga Internasional dalam rangka Pengembangan Produk;
- b. Membangun Jaringan dengan Eksportir;
- c. Standarisasi Mutu Produk Baik Nasional, Bilateral, Regional, dan Internasional;
- d. Pengembangan Peluang Pasar Luar Negeri.

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja nilai ekspor di dukung oleh beberapa faktor pendukung, yaitu :



- Tingginya kreatifitas para pelaku IKM dalam berinovasi;
- Keragaman produk;
- Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata;
- Diberlakukannya Pasar Bebas Asia Pasific 2020.

Sedangkan beberapa faktor penghambat yang masih terlihat dan sangat dirasakan oleh para pelaku IKM/UKM dalam menjangkau akses pasar luar negeri, yaitu :

- Penurunan permintaan dari buyer dikarenakan persaingan harga dengan Negara lain;
- Bahan baku impor dengan pajak yang tinggi;
- Persaingan permintaan produk yang sulit dibuat oleh beberapa pengusaha Kota Bandung sehingga beralih ke Negara lain;
- Permintaan dari luar negeri selalu terbatas oleh kapasitas produksi karena permodalan, bahan baku dan pengetahuan tentang teknologi masih terbatas;
- Produk IKM/UKM masih terbatas dalam hal kualitas bahan baku terutama untuk makanan yang akan memasuki pasar Eropa, Asia dan Australia.

## 2. Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan

Capaian kinerja pada Tahun 2019 adalah sebanyak 10 komoditi dari target sebanyak 10 komoditi sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini tercapai sesuai target yang telah di tetapkan pada



Tahun 2019. Capaian kinerja Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya tidak dilakukan pengukuran.

Indikator kinerja Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan didukung oleh Program Pembinaan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan alokasi anggaran pada Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 1.397.994.573,90 yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pemantauan informasi harga barang kebutuhan pokok dan operasi pasar/pasar murah;
- b. Pembinaan dan Pengendalian Lingkup Distribusi Perdagangan.

### 3. Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Capaian kinerja pada Tahun 2019 adalah sebesar 9,22 % dari target sebesar 15 % sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 162.69 %, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 dan jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2018, telah terjadi penurunan harga komoditi barang kebutuhan pokok yang sangat signifikan sebesar 32.90 %.

Indikator kinerja Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok didukung oleh Program Pembinaan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemantauan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan



Operasi Pasar/Pasar Murah dengan alokasi anggaran pada Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 1.397.994.573,00.

Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan survey/pemantauan perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di 8 Pasar Tradisional Kota Bandung.

Tingkat lonjakan harga dihitung berdasarkan angka kenaikan/penurunan harga rata-rata pada 9 jenis komoditi (sesuai dengan Perpres No. 71 Tahun 2015) selama kurun waktu 3 bulan (triwulan) dibandingkan dengan angka kenaikan/penurunan harga rata-rata 9 jenis komoditi pada triwulan sebelumnya. Angka kenaikan/penurunan harga di dapat melalui kegiatan pemantauan harga barang kebutuhan pokok pada hari Selasa dan Kamis setiap minggu ke lokasi pasar rakyat di Kota Bandung.

#### 4. Cakupan pembinaan e-commerce

Capaian target kinerja pada Tahun 2019 adalah sebanyak 150 pelaku usaha dari target sebanyak 150 pelaku usaha, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang telah di tetapkan pada Tahun 2019. Capaian kinerja Cakupan pembinaan e-commerce tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya tidak dilakukan pengukuran.

Indikator kinerja Cakupan pembinaan e-commerce didukung oleh Program Pengembangan E-Commerce yang dilaksanakan melalui Kegiatan Fasilitasi Pengembangan E-Commerce dengan alokasi anggaran pada



Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 203.458.500,00. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha tentang apa dan bagaimana mengembangkan pemasaran melalui perdagangan e-commerce.

5. Meningkatnya kualitas pelaku perdagangan dalam negeri

Capaian target kinerja pada Tahun 2019 adalah sebanyak 255 pelaku usaha dari target sebanyak 255 pelaku usaha, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, tahun ini menurun sebanyak 45 pelaku usaha dari tahun sebelumnya yang mencapai 300 pelaku usaha.

Indikator kinerja Meningkatnya kualitas pelaku perdagangan dalam negeri didukung oleh Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dengan alokasi anggaran pada Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 1.396.771.300,00 yang dilaksanakan melalui Kegiatan :

- a. Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal;
- b. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar Rakyat;
- c. Kegiatan Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga;
- d. Kegiatan Pengembangan Usaha Bagi Pedagang Formal.

Indikator kinerja Meningkatnya kualitas pelaku perdagangan dalam negeri dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepada para pelaku usaha formal,



pedagang pasar rakyat dan toko modern serta temu bisnis atau kemitraan dengan para pelaku retail.

6. Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang

Capaian target kinerja pada Tahun adalah sebanyak 124.646 alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) dari target sebanyak 120.600 alat UTTP, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,35 %, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019. Capaian kinerja Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya tidak dilakukan pengukuran.

Indikator kinerja Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang didukung oleh Program Standardisasi Kemetrolgian dengan alokasi anggaran pada Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 2.411.996.380,00 yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Kegiatan Operasionalisasi UPT Kemetrolgian dan Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- b. Kegiatan Pengawasan dan Pengamatan Kemetrolgian.

Indikator kinerja Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang dilaksanakan dengan melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap alat UTTP, baik yang baru maupun yang telah digunakan.



7. Informasi mengenai barang kena cukai ilegal

Capaian target kinerja pada Tahun 2019 adalah sebanyak 15 merk rokok dari target sebanyak 15 merk rokok, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019. Capaian kinerja Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya tidak dilakukan pengukuran.

Indikator kinerja Informasi mengenai barang kena cukai ilegal didukung oleh Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dengan alokasi anggaran pada Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 224.986.848,00 yang dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau.

**Sasaran 3**

Meningkatnya daya saing perindustrian

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Meningkatnya daya saing perindustrian**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya IKM yang memiliki standarisasi	IKM	400	410	102.50	350	350	100.00
2	Meningkatnya IKM yang berdaya saing	IKM	n/a	n/a	0.00	280	280	100.00
3	Meningkatnya kemampuan IKM dalam proses produksi	Pelaku usaha	n/a	n/a	0.00	250	250	100.00
4	Meningkatnya daya saing sentra industri	Sentra	n/a	n/a	0.00	1	1	100.00

Sasaran Meningkatkan Daya Saing Perindustrian dapat dilihat dari sebanyak 4 indikator kinerja yaitu (1) Meningkatnya IKM yang memiliki standarisasi; (2) Meningkatnya IKM yang berdaya saing; (3) Meningkatnya kemampuan IKM dalam proses produksi; dan (4) Meningkatnya daya saing sentra industri.

1. Meningkatnya IKM yang memiliki standarisasi

Capaian target kinerja pada Tahun 2019 adalah sebanyak 350 IKM dari target sebanyak 350 IKM, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, tahun ini menurun sebanyak 2.50 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 102.50 %.



Indikator kinerja Meningkatnya IKM yang memiliki standarisasi didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dengan alokasi anggaran pada Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 867.041.000,00 yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standardisasi, Pengujian dan Kualitas;
- b. Pengembangan Sistem Inovasi Industri.

2. Meningkatnya IKM yang berdaya saing

Capaian target kinerja pada Tahun 2019 adalah sebanyak 280 IKM dari target sebanyak 280 IKM, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019. Capaian kinerja Meningkatnya IKM yang berdaya saing tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya tidak dilakukan pengukuran.

Indikator kinerja Meningkatnya IKM yang Berdaya Saing didukung oleh Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran pada Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 3.426.979.999,81 yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Penguatan Kemampuan Sumber Daya Manusia IKM;
- b. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya;



- c. Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam Meningkatkan Kemampuan Sistem Produksi;
    - d. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Industri Kecil Menengah.
3. Meningkatnya kemampuan IKM dalam proses produksi

Capaian kinerja pada Tahun 2019 adalah sebanyak 250 pelaku usaha dari target sebanyak 250 pelaku usaha, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini tercapai sesuai target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019. Capaian kinerja Meningkatnya kemampuan IKM dalam proses produksi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya tidak dilakukan pengukuran. Indikator kinerja Meningkatnya Kemampuan IKM Dalam Proses Produksi didukung oleh Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan alokasi anggaran pada Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 1.468.708.821,00 yang dilaksanakan melalui kegiatan :

  - a. Pelatihan keterampilan industri kerajinan;
  - b. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri.
4. Meningkatnya daya saing sentra industri

Capaian kinerja pada Tahun 2019 adalah sebanyak 1 Sentra dari target sebanyak 1 Sentra, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini tercapai sesuai target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019. Capaian kinerja Meningkatnya daya saing sentra industri tidak



dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya tidak dilakukan pengukuran.

Indikator kinerja Meningkatnya Daya Saing Sentra Industri didukung oleh Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dengan alokasi anggaran pada Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 159.551.425,00 yang dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan usaha sentra industri.

#### **D. Akuntabilitas Keuangan**

Tahun Anggaran 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) Sasaran dengan anggaran sebesar Rp. 11.490.985.847,- dan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp. 10.843.612.284,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94.37 %. Adapun rincian pagu dan realisasi capaian anggaran Sasaran Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.13**  
**Pagu dan Realisasi Capaian Anggaran Sasaran**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung**  
**Tahun 2019**

No.	Sasaran	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	64.299.000,00	64.278.000,00	99.97
2.	Meningkatnya daya saing perdagangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1.140.889.000,00	1.075.716.550,00	94,29
		Program Pembinaan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.397.994.573,00	1.335.336.000,00	95.52
		Program Pengembangan E-Commerce	203.458.500,00	194.909.000,00	95.80
		Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	1.396.771.300,00	1.306.672.200,00	93.55
		Program Standardisasi Kemetrolgian	1.140.305.380,00	1.101.635.477,00	96.61
		Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	224.986.848,00	187.614.504,00	83.39
3.	Meningkatnya daya saing perindustrian	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	867.041.000,00	853.017.000,00	98.38
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.426.979.999,81	3.210.755.967,00	93.69
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1.468.708.821,00	1.354.328.986,00	92.21
		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	159.551.425,00	159.348.600,00	99.87
<b>Jumlah</b>			<b>11.490.985.846,81</b>	<b>10.843.612.284,00</b>	<b>94.37</b>



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :



- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.67 %
- Sasaran 2 terdiri dari 7 indikator dengan nilai 99.85 %
- Sasaran 3 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 11.490.985.846,81 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.843.612.284,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 647.373.563,00

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 11.490.985.846,81 (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam koma delapan puluh satu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah



94.37 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.